

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan  
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota .....



PENYERAHAN LHT, BPK RI untuk Pemda Bonbol saat berlangsung di Auditorium BPK RI, Jumat (18/12) kemarin. foto (riel/rg)

TEMUAN BPK RI

# Dana Covid-19 di Gorontalo Bermasalah?

**GORONTALO (RAGORO)** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo, terkait dengan temuan penanganan Covid-19 di Gorontalo.

Untuk itu, BPK memberikan tenggat waktu selama 60 hari ke depan untuk menindaklanjuti sejumlah temuan tersebut sesuai pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tang-

gung jawab keuangan negara. â€œsesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II tahun 2020, ada sejumlah temuan, antara lain, penyediaan jejaring laboratorium dalam rangka penemuan kasus Covid-19 dan pengambilan serta pengiriman spesimen, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo belum memadai.â€ ujar Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo, Dwi Sabardiana dalam sambutannya, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester II

2020, yang berlangsung di Auditorium Kantor perwakilan BPK RI di Gorontalo, Jumat, kemarin. Temuan lainnya kata Dwi Sabardiana adalah Pemprov dan pemerintah kota dan kabupaten Gorontalo belum secara aktif dan memadai mengendalikan pandemi Covid-18, serta belum menggunakan manajemen klinis dalam mengendalikan pandemi covid. Yang disoroti BPK juga adalah penerbitan regulasi terkait penerapan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan pemprov dan belum didukung petunjuk pelaksanaan yang jelas. â€œpemerintah Kota dan kabupaten Gorontalo belum memanfaatkan promosi protokol kesehatan dalam

2020, yang berlangsung di Auditorium Kantor perwakilan BPK RI di Gorontalo, Jumat, kemarin. Temuan lainnya kata Dwi Sabardiana adalah Pemprov dan pemerintah kota dan kabupaten Gorontalo belum secara aktif dan memadai mengendalikan pandemi Covid-18, serta belum menggunakan manajemen klinis dalam mengendalikan pandemi covid. Yang disoroti BPK juga adalah penerbitan regulasi terkait penerapan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan pemprov dan belum didukung petunjuk pelaksanaan yang jelas. “Kepemrintah Kota dan kabupaten Gorontalo belum memanfaatkan promosi protokol kesehatan dalam

rangka upaya pencegahan Covid-19 akibatnya belum semua masyarakat memahaminya,” kata Dwi Sabardiana lagi.

Enam poin, temuan lainnya adalah rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta sebagian hasil refocusing dan relokasi anggaran dialokasikan untuk belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19. Pengadaan bahan kebutuhan pokok pada kegiatan pasar kebutuhan pokok bersubsidi tahun 2020 yang dilaksanakan dinas Koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan belum sesuai ketentuan. Verifikasi dan validasi data penerima serta

pengelolaan bantuan langsung pangan daerah atau BLPD belum memadai. Serta rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan Covid tidak sesuai ketentuan. Selain itu ditemukan realisasi belanja modal alat kesehatan di RSUD Toto Kabila yang termasuk dalam program refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 belum maksimal untuk penanganan Covid-19. Selain itu pengelolaan keuangan LHP hasil pemeriksaan semester II Tahun 2020 oleh BPK RI diserahkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato. (riel/rg)

Diambil dari: Harian Rakyat Gorontalo, Sabtu 19 Desember 2020